

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kemitraan India-Rusia telah terjalin sejak lama, dimana hal tersebut telah menjadi pilar utama kebijakan luar negeri India. Sejak penandatanganan “Deklarasi Kemitraan Strategis India-Rusia” pada Oktober tahun 2000, India dan Rusia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di hampir semua bidang hubungan bilateral, termasuk politik, keamanan, perdagangan dan ekonomi, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya (Rodkiewicz, 2023). Dalam bidang politik, India dan Rusia secara rutin menyelenggarakan KTT Tahunan yang merupakan mekanisme dialog terlembaga tertinggi dalam kemitraan strategis antara India dan Rusia (Rekha, 2020).

India dan Rusia juga menjalin kerjasama antar pemerintah yang dituangkan dalam *Indo-Russia Inter-Governmental Commission* (IRIGC) dan terbagi menjadi IRIGC-TEC yang berfokus pada perdagangan, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi serta kebudayaan, dan IRIGC-MTC yang berfokus pada kerjasama teknis militer (Sharma, 2012). Dalam bidang pertahanan dan keamanan, India memiliki kerjasama jangka panjang dan luas dengan Rusia. Rusia merupakan pemasok senjata terbesar ke India pada tahun 2013-2017 dan 2018-2022 (Peri, 2023). Pada bidang ekonomi dan perdagangan, nilai perdagangan bilateral antara India dan Rusia dalam kurun waktu satu tahun yang terhitung dari April 2022-April 2023 mencapai US\$ 50 miliar, hal ini disebabkan oleh peningkatan ekspor energi dan

barang setengah jadi seperti minyak, solar, batu bara, pupuk buatan, dan logam. Pangsa minyak Rusia dalam impor India meningkat dari 2% sebelum Februari 2022 menjadi 45% pada Juni 2023 dan mencapai sekitar 2,2 juta barel setiap hari (Rodkiewicz, 2023).

Meskipun memiliki hubungan baik dengan Rusia, di sisi lain India juga menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat yang dianggap sebagai rival di kancah pergaulan internasional, salah satunya di bidang pertahanan yang mempunyai banyak aspek dan mencakup dialog bilateral yang dilembagakan secara teratur, latihan militer, dan pengadaan pertahanan. Pada bidang perdagangan dan ekonomi, Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar India sejak tahun 2021, dan India adalah mitra dagang terbesar ke-7 Amerika Serikat. Pada tahun 2022, perdagangan barang antara India dan Amerika Serikat mencapai US\$ 133 miliar, sedangkan perdagangan jasa mencapai US\$ 58 miliar. Selain itu, Amerika Serikat merupakan sumber FDI terbesar ketiga India, dengan aliran masuk sebesar US\$ 6,04 miliar selama tahun 2022-2023. Sedangkan pada bidang energi, Kedua negara sepakat untuk meluncurkan Kemitraan Agenda Iklim dan Energi Bersih India-Amerika Serikat 2030 dengan dua jalur kemitraan, yaitu Kemitraan Energi Bersih Strategis dan Dialog Aksi Perubahan Iklim dan Mobilisasi Keuangan (Nguyen, 2024).

Pasca invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Amerika Serikat memberikan himbauan untuk turut serta menjatuhkan sanksi kepada Rusia sebagai kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat secara halus mendorong India agar secara terbuka menegur Presiden Vladimir Putin karena melancarkan

invasi ke Ukraina. Namun, pemerintahan Joe Biden juga menyatakan bahwa jika India menerima tawaran Rusia untuk memasok minyak mentah dengan harga diskon, hal tersebut tidak akan mendatangkan sanksi. India telah menegaskan dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan secara darurat pada 24 Februari 2022, bahwa India mendukung de-eskalasi ketegangan yang mendesak dan upaya diplomatik yang berkelanjutan dan terfokus untuk menjembatani berbagai kepentingan. Tetapi bahkan setelah Vladimir Putin mengumumkan peluncuran operasi militer di Ukraina, India tidak kunjung mengutuk tindakan Rusia. India juga abstain dari pemungutan suara yang disponsori atau didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Umum yang menentang Rusia. India juga memutuskan untuk membeli minyak Rusia dengan harga diskon dan menjadikan Rusia sebagai top supplier minyak ke India (Bhaumik, 2022).

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan lebih dalam mengenai alasan India menolak untuk turut serta memberikan sanksi kepada Rusia sebagai kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa riset terdahulu sebagai acuan penulis yang diantaranya penelitian dengan judul “Penolakan Turki Terhadap Himbauan Uni Eropa Untuk Turut Menjatuhkan Sanksi Ke Rusia Pada Tahun 2014” karya Meisarah Marsa. Penelitian tersebut membahas mengenai alasan yang melatarbelakangi Turki menolak memberikan sanksi kepada Rusia atas konflik Crimea antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014 ditinjau dari analisis

kepentingan nasional dan analisis *Rational Actor Model*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa kepentingan Turki terkait kerjasama nuklir dan proyeksi gas antara Turki dan Rusia, serta peluang kerjasama energi baru dan perdagangan dengan Rusia (Marsa, 2016). Kemudian penulis juga menjadikan penelitian yang berjudul “Penolakan Serbia Terhadap Himbauan Uni Eropa Untuk Turut Menjatuhkan Sanksi Ke Rusia Tahun 2014- 2018” karya Eufat Kamil Kahar sebagai referensi, dimana penelitian ini menjelaskan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penolakan Serbia untuk turut serta bersama Uni Eropa dalam memberikan sanksi kepada Rusia ditinjau dari analisis konsep identitas dalam konstruktivisme sosial dan analisis kepentingan nasional (Kahar, 2019).

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Penolakan Hungaria Atas Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia Pada Tahun 2022” karya Baiq Mulhimmah, Yayang Windari, Lalu Putrawandi Karjaya, dan Kurnia Zulhandayani Rizki. Penelitian ini membahas tentang alasan penolakan Hungaria untuk turut serta menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas konflik Rusia-Ukraina yang tengah berlangsung ditinjau dari analisis teori pilihan rasional. Penelitian ini menjelaskan mengenai hubungan dan kerjasama yang telah terjalin erat antara Hungaria dan Rusia, serta perhitungan untung rugi dari beberapa alternatif tersedia yang akan digunakan sebagai kebijakan Hungaria dalam merespon konflik Rusia-Ukraina yang tengah berlangsung (Baiq Mulhimmah, 2023). Penelitian tersebut digunakan penulis untuk memahami *framework* analisis kepentingan nasional dan *Rational Choice Theory*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan riset-riset terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis, dapat kita lihat dengan jelas pada *unitary actor* yang diteliti dan jangkauan waktu penelitian. Keempat penelitian terdahulu fokus *unitary actor* yang terlibat adalah negara Turki, Serbia, dan Hungaria, dengan jangkauan waktu masing-masing adalah tahun 2014, 2014 – 2018, dan 2022. Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian ini, yang melibatkan India sebagai fokus utama *unitary actor* dengan jangkauan waktu tahun 2001-2022.

I.2 Rumusan Masalah

Mengapa India menolak untuk turut serta memberikan sanksi kepada Rusia sebagai kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022?

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah guna melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam menyelesaikan program sarjana studi hubungan Internasional.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan lebih dalam mengenai alasan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendorong India menolak untuk turut serta memberikan sanksi kepada Rusia sebagai kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

I.4 Kerangka Pemikiran

I.4.1 Foreign Policy

Kebijakan luar negeri adalah suatu konsep atau rancangan tindakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan negara sebagai upaya menghadapi negara atau unit politik internasional lain. Kebijakan luar negeri disusun guna mewujudkan tujuan nasional spesifik suatu negara dan dituangkan dalam bentuk kepentingan nasional (Olton, 1999). Kebijakan luar negeri dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional warga negara, meskipun kepentingan nasional tersebut ditetapkan oleh pihak penguasa pada waktu tertentu (Mas'ood, 1994). Dalam upaya memenuhi kepentingan nasional masing-masing, setiap negara membangun kemitraan dengan negara lain baik secara bilateral, trilateral, maupun multilateral.

Kebijakan luar negeri menurut pandangan Rosenau adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi serta mendapatkan manfaat dari situasi eksternal melalui keseluruhan perilaku dan tindakan negara tersebut (James N. Rosenau, 1976). Menurut pandangan Rosenau, tujuan kebijakan luar negeri adalah untuk menjaga dan melindungi keberadaan suatu negara (Rosenau, 1976). Rosenau juga berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara apabila dikaji, kita akan mempelajari sesuatu yang lebih luas dan kompleks, dimana hal tersebut termasuk kehidupan internal dan kebutuhan eksternal, yang didalamnya meliputi aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai dan menjaga jati diri sosial, hukum, serta geografi suatu negara (Rosenau, 1976).

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, perlu dilakukan beberapa mekanisme yang meliputi: 1. Mendeskripsikan kepentingan nasional ke dalam bentuk rancangan dan sasaran spesifik; 2. Menetapkan faktor situasi domestik dan internasional yang berhubungan dengan tujuan kebijakan luar negeri; 3. Melakukan analisis kapabilitas nasional dalam mewujudkan hasil yang diinginkan; 4. Mengembangkan rancangan atau strategi untuk menggunakan kapabilitas nasional dalam menangani aspek-aspek tertentu guna mewujudkan tujuan nasional sesuai yang telah ditetapkan; 5. Menjalankan tindakan yang diperlukan; 6. Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala terkait progres yang telah berjalan dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan (Olton, 1999). Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri mencakup seluruh perbuatan dan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari lingkungan tersebut (Holsti, 1992).

Pada dasarnya sasaran atau tujuan kebijakan luar negeri merupakan peran dari mekanisme tujuan nasional suatu negara disusun. Dimana tujuan tersebut dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di masa lalu dan ambisi atau harapan di masa mendatang. Tujuan kebijakan luar negeri sendiri dibagi menjadi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk tujuan jangka panjang suatu kebijakan luar negeri umumnya adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan (Rosenau, 1969).

Sedangkan menurut pendapat Plano, kebijakan luar negeri disusun guna mencapai tujuan atau kepentingan nasional suatu negara. Tujuan nasional yang hendak dicapai suatu negara merupakan susunan konkret yang dirancang dengan

menghubungkan kepentingan nasional terhadap kondisi eksternal yang tengah terjadi serta kemampuan yang dimiliki guna menjangkau tujuan atau sasaran tersebut. Tujuan nasional disusun, dipilih, dan diputuskan oleh para pembuat kebijakan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) tertentu di lingkungan internasional (Olton, 1999).

I.4.2 Rational Decision-Making Model (Rational Choice Theory)

Salah satu fokus utama analisis Hubungan Internasional adalah analisis terkait *foreign policy* yang bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang suatu negara mengambil suatu tindakan maupun kebijakan. Dalam mengungkapkan hal tersebut, rasionalitas merupakan sesuatu yang tepat untuk dijadikan tolak ukur pengambilan kebijakan. Konsep rasionalitas tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi *Rational Decision-Making Model* atau *Rational Choice Theory* (Oppenheimer, 2012).

Berdasar pendapat dari John Von Neumann dan Oskar Morgenstern, teori pilihan rasional merupakan konsep analisis dalam proses pengambilan kebijakan melalui pemaksimalan nilai dari opsi-opsi tersedia yang mungkin mengandung resiko (McDermott, 2001). Mereka menegaskan bahwa pilihan rasional bergantung pada bagaimana aktor rasional/ pengambil kebijakan memaksimalkan *Utility Function* yang merupakan kalkulasi dari opsi kebijakan yang dipilih (Prokop, 2016). Lain hal nya dengan Neumann yang menegaskan konsep *rational choice* dari *Utility Function*, Joe Oppenheimer berpendapat bahwa *Self Interest References* umumnya merupakan aspek yang paling berpengaruh dalam menetapkan pilihan

rasional. Menurut Oppenheimer, sebuah pilihan disusun dan ditetapkan oleh suatu tokoh sesuai preferensi mereka (Oppenheimer, 2012).

Kemudian Graham Tillet Allison menambahkan *Variable Agent* sebagai pengambil kebijakan dengan tujuan agar konsep *Rational Choice Theory* lebih mudah dimengerti. Menurut Allison, *Variable Agent* dapat menentukan pilihan rasional dengan cara melakukan pertimbangan konsekuensi dari beberapa opsi alternatif yang tersedia. Selanjutnya Allison dalam kajiannya terkait konsep pilihan rasional, mengembangkan tiga pendekatan dalam mekanisme pengambilan kebijakan dengan indikator yang berbeda, yaitu: 1. *Rational Actor Model*/ Model Aktor Rasional dimana dalam proses pengambilan kebijakannya didasarkan pada *Unitary Actor*; 2. *Bureaucratic Politics Model*/ Model Politik Birokratik yang dalam proses pengambilan kebijakan dihasilkan dari birokrasi politik pemerintahan; dan 3. *Organizational Process Model*/ Model Proses Organisasi, dimana dalam proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa aktor dari beberapa lembaga maupun instansi (Inan, 2004).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Model Aktor Rasional/ *Rational Actor Model* yang dikembangkan Allison. Konsep ini umumnya digunakan oleh Allison untuk menganalisis alasan atau motif suatu negara mengambil kebijakan tertentu. Penulis menilai bahwa konsep *Rational Actor Model* sesuai dengan fokus analisis penelitian ini, yang menekankan pada kebijakan India sebagai *unitary actor*. Hal tersebut tentu mempermudah penulis menganalisis motif India menolak untuk turut serta memberikan sanksi kepada Rusia sebagai kecaman atas invasi yang dilakukan negara tersebut ke Ukraina pada tahun 2022.

I.4.3 Rational Actor Model (RAM)

Rational Actor Model/ Model Aktor Rasional adalah salah satu bagian penting dalam mekanisme pengambilan kebijakan luar negeri. Konsep model aktor rasional merupakan salah satu alat yang dinilai paling sesuai untuk menganalisis tindakan suatu negara dalam situasi tertentu, dimana dalam proses yang cenderung dipengaruhi oleh situasi politik luar negeri negaranya. Dalam konsep *Rational Actor Model*, negara dianggap sebagai kesatuan aktor yang mewakili kebijakan domestiknya (Neack, 2013).

Graham T. Allison mencetuskan konsep *Rational Actor Model* dengan tujuan untuk membantu menganalisis dan menerangkan politik dan kebijakan luar negeri negara tertentu melalui analisis pilihan rasional. Rasionalitas dalam konteks tersebut menurut Allison didefinisikan sebagai pertimbangan dari beberapa alternatif yang memiliki konsekuensi menguntungkan paling banyak bagi negara (DeRouen, 2010). Kemudian Ramya menguraikan kembali konsep *Rational Actor Model* yang dicetuskan Allison, dimana Ramya berpendapat bahwa konsep Model Aktor Rasional berdasar pada gagasan kaum realis yang dalam proses pengambilan kebijakan, suatu negara harus melibatkan faktor rasionalitas, faktor kepentingan, dan pilihan serta konsekuensi (Ramya, 2013).

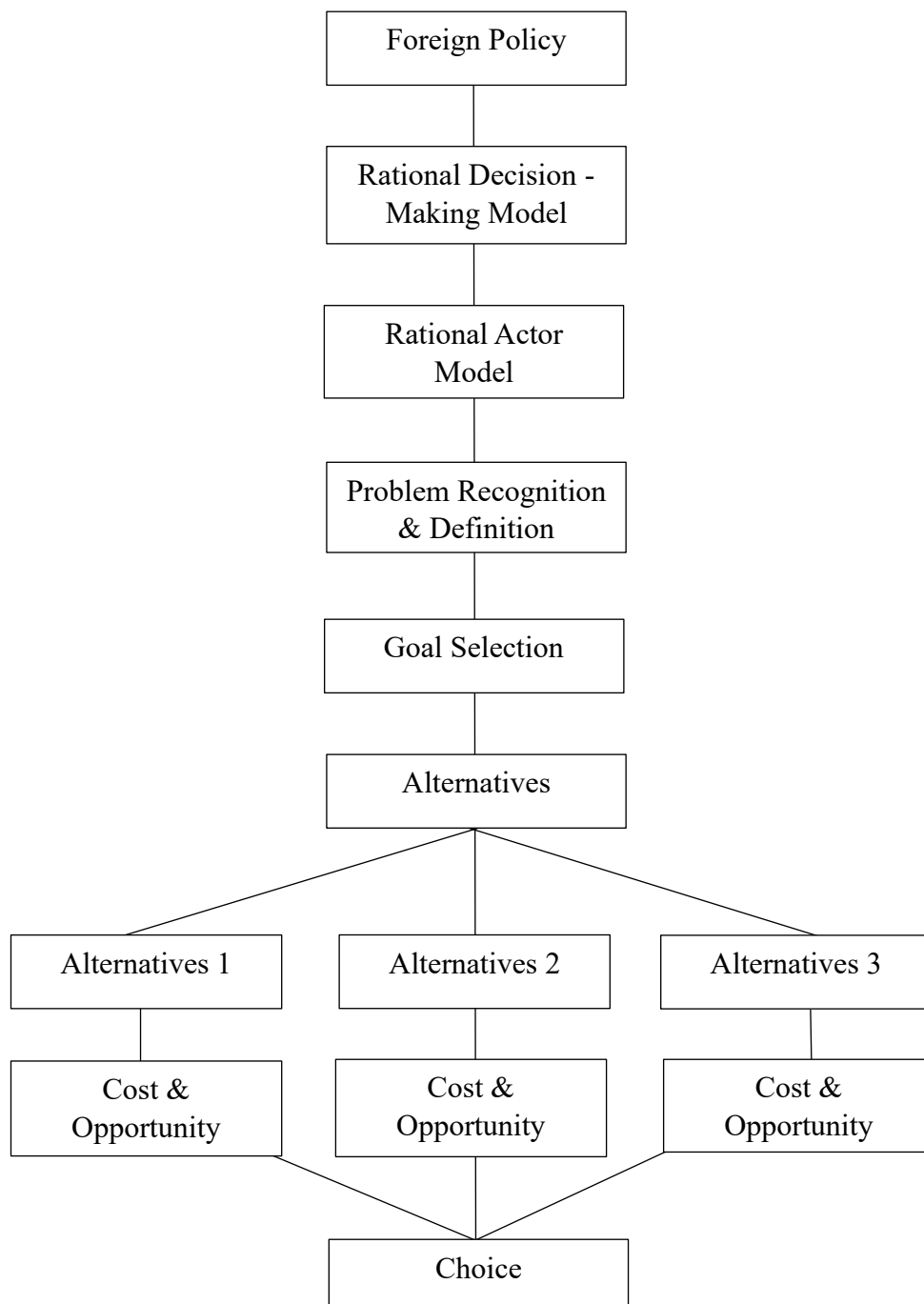
Kemudian Branislav L. Slantchev berpendapat bahwa konsep *Rational Actor Model* merupakan analisis yang ideal untuk digunakan dalam konteks analisis kebijakan luar negeri. Slantchev berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dapat diidentifikasi melalui analisis alternatif yang tersedia, dimana alternatif tersebut memiliki probabilitas yang tidak sama. Probabilitas yang

dimaksud ialah kemungkinan positif maupun negatif dari alternatif yang tersedia (Slantchev, 2005).

Graham T. Allison dalam mengembangkan konsep *Rational Actor Model*, merumuskan empat tahapan analisis, yaitu: (1) *Problem recognition and definition*, ketika para pembuat kebijakan merasakan munculnya permasalahan eksternal, mereka mencoba untuk mendefinisikan perbedaan karakteristiknya secara objektif. Objektivitas membutuhkan informasi lengkap mengenai tindakan, motivasi, dan kapabilitas aktor lain, serta karakteristik lingkungan dan tren global. Idealnya proses pengumpulan informasi akan dilakukan secara lengkap sehingga terkumpul semua fakta yang relevan terkait permasalahan yang tengah dihadapi. (2) *Goal Selection*, pembuat kebijakan atau aktor rasional harus merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam hal ini, Allison berpendapat bahwa umumnya permasalahan yang berkaitan dengan *national security* dan *national interest* yang menjadi faktor utama penentu tujuan suatu negara. (3) *Identification of alternatives*, merupakan proses identifikasi berbagai tindakan yang dapat digunakan negara dalam mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi. Tindakan tersebut biasanya berkaitan dengan penggunaan kekuatan baik dalam bentuk militer, ekonomi, diplomatik, maupun gabungan dari ketiga bentuk tersebut. Dalam proses ini, aktor rasional harus mengidentifikasi opsi kebijakan yang ada termasuk *cost* dan *opportunity* dari masing-masing opsi yang tersedia. *Cost* mengacu pada kelemahan atau kerugian yang mungkin timbul dari keputusan yang dipilih, sedangkan *opportunity* mengacu pada keuntungan yang akan diperoleh dari keputusan yang dipilih. (4) *Choice*, pada akhirnya aktor rasional hanya akan memilih satu pilihan,

yaitu yang memiliki prospek terbaik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam proses ini, aktor rasional/ pembuat keputusan harus menganalisis *cost* dan *opportunity* dengan dipandu oleh prediksi yang akurat tentang peluang keberhasilan dari setiap pilihan (Allison, 1968).

1.5 Sintesa Pemikiran



Dalam lingkungan internasional, masing-masing negara memiliki kiat atau strategi tindakan yang dirancang dan disusun para pembuat kebijakan negara dalam menghadapi negara lain. Strategi atau rencana tindakan tersebut adalah yang dinamakan kebijakan luar negeri. Kebijakan tersebut umumnya diatur untuk mewujudkan tujuan nasional yang dituangkan dalam kepentingan nasional. Dalam upaya mencapai kepentingan nasional, pembuat melakukan proses pengambilan kebijakan melalui pemaksimalan nilai dari opsi-opsi yang tersedia. Untuk sampai pada opsi alternatif yang dipilih, maka perlu dilakukan *problem recognition and definition* untuk mendefinisikan masalah apa yang tengah dihadapi suatu negara. Sehingga selanjutnya akan teridentifikasi tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Dari tujuan yang telah teridentifikasi, kemudian akan muncul beberapa alternatif yang bisa kita bandingkan antara peluang dan kerugian alternatif-alternatif yang tersedia. Kemudian dari pertimbangan tersebut, dapat dipilihlah satu kebijakan yang dianggap paling rasional untuk suatu negara mencapai kepentingan nasionalnya.

I.6 Argumen Utama

Keputusan India menolak untuk turut serta memberikan sanksi kepada Rusia atas invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasional India untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. kepentingan nasional tersebut merupakan tujuan yang dijadikan India sebagai landasan dalam menentukan kebijakan luar negeri dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. India harus membuat kebijakan yang dinilai paling rasional untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut dengan memanfaatkan situasi

internasional yang tengah berlangsung. Dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022 terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan oleh India, yaitu: 1. Turut memberikan sanksi kepada Rusia sebagai kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina atau; 2. Menolak untuk turut memberikan sanksi kepada Rusia dan tetap mempertahankan hubungan baik dengan negara Rusia. Apabila dilakukan pertimbangan untung dan rugi oleh India, alternatif kedua merupakan opsi paling rasional dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina, mengingat India telah menjalin kemitraan strategis bersama Rusia sejak tahun 2001, sekaligus India dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan anggaran yang lebih kecil melalui impor minyak dengan harga diskon yang ditawarkan Rusia. Sehingga India memutuskan untuk tidak turut serta memberikan sanksi pada Rusia.

I.7 Metode Penelitian

I.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian eksplanatif sendiri bertujuan untuk menguraikan alasan terjadinya suatu fenomena. Hasil dari penelitian tipe ini menggambarkan kausalitas terjadinya suatu fenomena. Tipe penelitian eksplanatif ini identik dengan penggunaan kata tanya “mengapa” dalam mengembangkan informasi yang tersedia. Tujuan dilakukannya penelitian eksplanatif ini adalah untuk menghubungkan pola-pola berbeda yang saling berkaitan, sehingga pada akhirnya menghasilkan pola hubungan sebab-akibat (Mulyadi, 2011).

Penggunaan tipe penelitian tersebut dalam penulisan ini untuk menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara permasalahan yang tengah dihadapi, tujuan yang

ditetapkan berdasarkan kepentingan nasional, alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang tersedia serta perhitungan untung dan rugi, hingga pada akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang dinilai paling rasional. Dalam penerapannya pada skripsi penulis, tipe penelitian eksplanatif ini digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari keputusan India untuk tidak turut serta memberikan sanksi kepada Rusia atas invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022.

I.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jangkauan penulis akan dibatasi oleh waktu dan ruang lingkup. Hal tersebut bertujuan untuk memfokuskan pembahasan tentang pokok permasalahan yang diangkat. Jangkauan waktu yang ditetapkan oleh penulis adalah dari tahun 2001 hingga tahun 2022. Pemilihan tahun 2001 sebagai batas awal penelitian ini didasarkan pada dimulainya kemitraan strategis antara India dengan Rusia yang dituangkan dalam *Indo-Russia Intergovernmental Commission*. Sedangkan pemilihan tahun 2022 menjadi batas waktu penelitian penulis didasarkan pada kebijakan India menolak himbauan untuk turut memberikan sanksi kepada Rusia atas invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, dan tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia sebagai mitra.

I.7.3 Teknik Pengumpulan Data Studi Pustaka

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, dimana data yang diperoleh dapat berupa artikel, jurnal, dan buku. Data sekunder ialah jenis data yang berasal dari penelitian pihak lain yang telah dilakukan sebelumnya. Data ini sudah ada dan sengaja dikumpulkan oleh penulis untuk menunjang dan melengkapi data dari sebuah penelitian yang sedang

dikerjakan. Data sekunder pada dasarnya merupakan data asli yang diperoleh dari lapangan yang telah dikumpulkan dalam bentuk laporan oleh orang lain. Singkatnya, data sekunder adalah data dari sumber kedua. Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena yang sedang terjadi tanpa terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti. Model observasi tersebut dijuluki sebagai observasi non-partisipatif (Sugiarto, n.d.).

I.7.4 Teknik Analisis Data Kualitatif

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dimana prosesnya tidak melibatkan dan tidak berbentuk angka. Umumnya, data yang diperoleh sifatnya subjektif. Pengumpulan data yang dapat dilakukan ketika menggunakan teknik analisis kualitatif adalah melalui kegiatan tinjauan pustaka, observasi, survei, maupun wawancara (Azehari, 2022).

I.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi bab I pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kerangka dan sintesa pemikiran, argumen utama, metode, dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab II penelitian ini akan membahas kajian mengenai perang Rusia-Ukraina dan juga proses pengambilan kebijakan India dalam menyikapi konflik tersebut.

Selanjutnya pada bab III akan memuat bahasan mengenai analisis kebijakan yang diambil India melalui konsep rational choice theory dengan model aktor rasional. Dalam bab ini akan membahas analisis *problem recognition and*

definition, goal selection, identification of alternatives serta *cost and opportunity* dari masing-masing alternatif, dan yang terakhir adalah *choice*.

Pada bab IV penutup yang berisi simpulan dan saran.